

UJIAN HARUS LIHAT BUKU*

Erman Rajagukguk

Di tengah-tengah pembicaraan tingginya harga-harga buku sekarang ini baik terbitan dalam negeri maupun yang diimpor dari luar, tidak kurang pula keluhan tokoh-tokoh pendidik terhadap malasnya para mahasiswa kita untuk membaca langsung buku-buku yang berhubungan dengan perkuliahannya.

Setelah Menteri Daoed Joesoef dalam berbagai kesempatan mengemukakan perlunya ditingkatkan “penalaran individu” menuju “manusia penganalisa” dengan jalan banyak menulis dan membaca, bahkan sampai-sampai Menteri “mengancam” bahwa kenaikan pangkat staf pengajar terutama akan dinilai melalui prestasi akademis dalam bentuk karya tulisnya, berbagai anjuran kepada para mahasiswa untuk membaca buku mulai ditingkatkan diberbagai universitas.

Beberapa penulis mulai membanding-bandingkan malasnya mahasiswa Indonesia dengan rekan-rekannya mahasiswa Amerika dalam membaca. Di kampus-kampus Amerika, katanya, para mahasiswa sarat dengan buku dan pembicaraan di kantin, di taman, selalu mengenai isi buku, tidak seperti mahasiswa di Indonesia.

Sejak anjuran yang agak keras dari Menteri PDK beberapa waktu yang lalu, berbagai universitas telah mengharuskan mahasiswanya membuat paper-paper sebagai syarat utama untuk menempuh ujian (dalam kondisi sekarang ini tentu menjadi beban baru bagi para mahasiswa). Beberapa staf pengajar di beberapa universitas telah mengharuskan pula para mahasiswa membaca buku dan menuliskan kesimpulannya di atas kertas. Bahkan diminta kepada para staf pengajar untuk menanyakan isi buku dalam ujian, agar para mahasiswa suka membaca buku-buku yang bersangkutan.

Bukan tidak timbul reaksi dari para mahasiswa. Ada yang dengan diam-diam mengemukakan keluhannya tentang tugas yang baru tersebut, tetapi juga ada yang secara terbuka mempersoalkannya. Bahkan disalah satu fakultas, mahasiswa ada yang berkeberatan mendapat tugas membaca buku-buku, dengan alasan masa ujian sudah dekat.

* Kompas, 26 September 1978.

Bukanlah lebih baik kita proklamasikan saja sekarang, bahwa dalam ujian-ujian mahasiswa harus melihat buku?

Tidak ada jaminan bahwa dengan melihat buku, seluruh peserta ujian akan lulus seratus persen. Bahkan saya menduga dengan kewajiban memberikan jawaban dengan disertai catatan kaki dan uraian atau apa yang menjadi dasar jawaban ujian tersebut, mahasiswa yang lulus hanya akan berkisar 15 persen saja. Akan tetapi hal itu dengan syarat isi pertanyaan tidaklah konvensional, tetapi diarahkan kepada keharusan untuk berpikir dalam menjawabnya.

Bandingkanlah misalnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang menyangkut berbagai bidang hukum.

Apakah Hukum Adat itu?

Apakah bedanya Hukum Adat dan Adat?

Berubah menjadi: Baru-baru ini Ketua Mahkamah Agung mengatakan para hakim adalah sumber pembentuk dan penemu hukum paling utama dalam menerapkan hukum tidak tertulis atau hukum adat. Bagaimana pendapat saudara dengan pernyataan tersebut? Bandingkan dengan polemik antara Ter Haar dan Holleman dan bagaimana perkembangannya sekarang ini?

Sebutkan subyek Hukum Internasional dan terangkan.

Berubah menjadi : Persetujuan Camp David tidak menyebut-nyebut PLO dalam penyelesaian sengketa Timur Tengah baru-baru ini. Bagaimana pendapat Saudara mengenai PLO dalam hubungannya dengan Perkembangan Hukum Internasional sekarang ini?

Bagaimana Tata Cara pembebasan tanah dan sebutkan Peraturannya?

Berubah menjadi: Muslim dan Johannes diberitakan tidak berani pulang ke rumahnya karena masalah ganti rugi tanah Cengkareng. Bagaimana sebaiknya penyelesaian ganti rugi atas tanah, baik untuk proyek pemerintah maupun swasta? Terangkan di mana letaknya sengketa ganti rugi atas tanah dalam praktek? Hubungkanlah dengan peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

Demikianlah kira-kira gaya pertanyaan-pertanyaan, di mana untuk menjawabnya haruslah dengan berpikir dan banyak membaca literatur, menghubungkannya satu dengan yang lain, bahkan dimungkinkan untuk meletakkan kesimpulan menurut pendapat sendiri.

Para mahasiswa yang tidak pernah membaca literatur, apakah buku-buku, peraturan perundang-undangan mengikuti keadaan melalui surat-surat kabar ataupun seminar-seminar, pasti akan kehabisan waktu membalik-balik buku ketika ujian berlangsung. Oleh karena itu

tidaklah perlu khawatir para mahasiswa membawa buku ke dalam ruangan ujian, bahkan wajib membawa buku sebanyak-banyaknya sekarang.

Akan tetapi syarat lainnya harus dipenuhi oleh para staf pengajar sendiri. Staf pengajar harus memulai dirinya untuk senantiasa membaca, mengizinkan para mahasiswa membaca buku-buku karangan lainnya (tanpa membatasi hanya buku karangan si anu yang baik) dan membuka kesempatan kepada para mahasiswa mengemukakan jawaban-jawaban yang mungkin tidak sependirian dengan staf pengajarnya.

Yang penting di sini adalah dasar dari jawaban dan jalan pikiran dari jawaban tersebut.

Duapuluh lima tidak selalu berasal dari lima kali lima, tetapi bisa juga duapuluh ditambah lima, seratus dibagi empat, lima belas tambah sepuluh dan beberapa alternatif lainnya. Bukankah ilmu sosial mempunyai berbagai pilihan?

Memang diakui dalam kondisi sekarang ini sistem ujian yang saya usulkan di atas (yang pada beberapa mata kuliah sudah dilaksanakan) terasa agak berat. Perpustakaan yang tidak memadai, buku-buku yang mahal harganya.

Sekarang ini untuk buku terbitan dalam negeri berkisar antara Rp1.500,00 s.d. Rp5.000,00. Bayangkan kalau untuk satu mata kuliah minimal ada enam buku, untuk delapan mata kuliah akan berjumlah 48 buku. Suatu biaya yang tidak terjangkau oleh sebagian besar mahasiswa. Akan tetapi inilah jalan yang harus ditempuh, agar kewajiban membaca dan kemudian menulis bisa dilaksanakan. Membaca, menulis dan diskusi adalah suatu hal yang fundamental bagi pengembangan ilmu.

Janganlah ujian-ujian ditempuh berdasarkan diktat, ringkasan kuliah, tanya jawab. Bahkan lebih “ganas” lagi, ujian bisa lulus dengan menghafal jawaban soal-soal dari beberapa ujian tahun sebelumnya. Marilah kita proklamasikan sekarang; ujian harus lihat buku.